

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agustyati, Khoirunnisa Nur, dkk, 2024, *Evaluasi Persidangan PHPU 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan Pemilu dan Demokrasi Substansial*, Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi, Jakarta
- Armia, Muhammad Siddiq, 2022, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), Banda Aceh.
- Arsad, Romli, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Alqaprint Jatinangor, Jatinangor.
- Asshiddiqie, Jimly., 2007, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia, Pasca Reformasi*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Bagja, Rahmat, 2020, *Hukum Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu: Konsep, Prosedur, dan Teknis Pelaksanaan*, Rajawali Pers, Depok.
- Fahmi, Khairul, 2012, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Rajawali Pers, Depok.
-, 2021, *Hak Pilih dalam Pemilihan Umum*, Rajawali Pers, Depok.
- Harun, Refly, 2016, *Pemilu Konstitusional: Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Isra, Saldi & Fahmi, Khairul, 2019, *Pemilihan Umum Demokratis: Prinsip-prinsip dalam Konstitusi Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Lubis, Todung Mulya, dkk, 2024, *Keadilan Elektoral di MK*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Lubis, Todung Mulya, dkk, 2024, *Antara Hukum Dan Politik*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Prihatmoko, Joko J., 2005, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung: Filosofi, Sistem dan Problema Penerapan di Indonesia*, Kerja Pustaka Pelajar dengan Lembaga Penelitian, Pengembangan dan Pengabdian Masyarakat, Semarang.

Saihu, Mohammad., *Et. Al*, 2012, *Penyelenggara Pemilu di Dunia: Sejarah, Kelembagaan, dan Praktik Pemilu di Negara Sistem Pemerintahan Presidensial, Semipresidensial, dan Parlementer*, Jakarta: Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia.

Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

Widiarty, Wiwik Sri, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Amandemen ke-6 Konstitusi Amerika Serikat.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang terakhir kali diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 20370 Tahun 2024 Tentang Pemilihan Pejabat Publik Korea Selatan.

Undang-Undang Nomor 1000494 Tahun 1971 Tentang Presiden Federal Austria.

Peraturan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Dalam Penanganan Perkara Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHPU.D-VI/2008.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

D. Jurnal

Achmad Edi Subiyanto, "Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas Sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia", (2020), 17:2, *Jurnal Konstitusi*.

Agustin, S., Maharani, R., & Ramadhani, R., "Dinamika ketegangan politik pasca pemilu 2024 dalam mempertahankan stabilitas demokrasi di Indonesia", (2024), 12:2, *Governance*.

Ahmad Jukari, "Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur Masif dan Sistematis dalam Pemilihan Kepala Daerah: Bagaimana Prosedur Penanganan dan Konstruksi Hukumnya?", (2022), 12:1, *Jurnal Al-Burhan*.

Almalibari, K. T., "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Pemilihan Umum.", (2019), 1:2, *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*.

Alvons, M., “Kebebasan Keamanan, Keadilan dan Kedamaian dalam Pemilihan Umum untuk Stabilitas Negara”, (2020), 15:4, *Jurnal Legilasi Indonesia*.

Ardi, Ilham Kurniawan, dan Zico Junius Fernando., "Desain Peradilan Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Di Mahkamah Konstitusi.", (2022), 7:2, *Al marah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*.

Asnawi, Et. Al, “Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif”, (2023), 3:3, *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*.

Bawembang, N., “Beban Pembuktian dan Alat Bukti dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi”, (2019), 7:4, *Lex Administratum*.

Daud M. Liando, “Pemilu dan Partisipasi Politik Masyarakat (Studi Pada Pemilihan Anggota Legislatif dan Pemilihan Presiden di Kabupaten Minahasa Tahun 2014)”, (2016), 3:2, *Jurnal LPPM Bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, Hukum*.

Dino Rizka Afdhali, Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakan Hukum Ditinjau dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, (2023), 6:2, *Collegium Studiosum Journal*.

Febby Mutiara Nelson, Topo Santoso, “*Principle of Simple, Speedy, and Low-Cost Trial and The Problem of Asset Recovery in Indonesia*”, (2021), 11:2, *Indonesian Law Review*.

Firmanto, A. A., “Penanganan Pelanggaran Administrasi Terstruktur Sistematis dan Masif (TSM) dan Masa Depan Demokrasi Lokal di Indonesia”, (2022), 1:1, *Jurnal Empati Kadarkum*.

Hamamah, F., “E-Litigasi Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan.”, (2022), 7:2, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*.

- Hidayat, M. T., “Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Perselisihan Hasil Pemilu”, (2009), 2:1, *Konstitusi Jurnal*.
- Ilham, M. H., “Kajian Atas Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan Terhadap Pemenuhan Hak Pencari Keadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 246 K/Pid/2017).”, (2018), 7:3, *Jurnal Verstek*.
- Kasim, A., & Purnamasari, A. I. “Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pilkada”, (2021), 33:2, *Mimbar Hukum*.
- Khairul Fahmi, Et. Al, “*The Role of The Law in Safeguarding Electoral Democracy in Indonesia*”, (2019), 22:2, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*.
- Khairul Fahmi, “Menelusuri Konsep Keadilan Pemilihan Umum Menurut UUD 1945”, (2016), 4:2, *Jurnal Cita Hukum*.
- Kirana, D. K., Setiawan, M. O. E., & Priza, S., “Demokrasi Indonesia Dalam Kapasitas Pemilu Yang Luber Jurdil”, (2024), 1:1, *Journal of Law and Social Society*.
- M. Mahrus Ali, Rachman, Irfan Nur, Wijayanti, Winda, Putranto, Rio Tri Juli, Anindyajati, Titis, & Asih, Putria Gusti., “Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur, dan Masif.”, (2012), 9:1, *Jurnal Konstitusi*.
- Nugraha, F. K. “Peran Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Sengketa Pemilu Kepala Daerah (Pilkada).”, (2016), 2:1, *Jurnal Transformative*.
- Nurtresna, R., & Mabsuti, M., “Peran Hukum Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial di Masyarakat”, (2024), 4:2, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*.
- Ofis Rikardo, Viranti Nur Ikhwan, Fani Larasati, “Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilu dan Pilkada Serentak”, (2023), 9:1, *Jurnal Hukum Sasana*.

- Pandu Alfa & Khairul Fahmi, "Pemilu dan Korupsi: Fenomena Pelanggaran Etika dan Moral Penyelenggara Pemilu di Indonesia", (2022), 2:2, *Journal of Social and Policy Issues*.
- Prihatin, L., Amin, M., & Darmawan, D., "Implikasi asas proporsionalitas dalam wanprestasi: suatu upaya mewujudkan keadilan substantif", (2023), 6:1, *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Rahayu, C. T., Karaniya, A. S., & Nisa, R. F., "Manipulasi Kekuasaan dalam Pilkada Serang 2024: Analisis Yuridis terhadap Pelanggaran Pemilu yang Terorganisir", (2025), 3:3, *Media Hukum Indonesia (MHI)*.
- Raihan, M., & Nasution, A. I. "Beban Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum Serentak 2024.", (2022), 8:2, *DIVERSI: Jurnal Hukum*.
- Sarmah, Moushumi, Saroj Bohra, "Right to Speedy Trial: Access to Justice", (2023), 11:6, *Russian Law Journal*.
- Shanty, W. Y., "Sistem "Full Pre Trial Disclosure" Dalam Penegakan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan", (2020), 11:3, *Jurnal Cakrawala Hukum*.
- Siagian, A., Fajar, H. F., & Alify, R. F., "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024", (2022), 5:2, *Jurnal Legislatif*.
- Simbolon, E. Z., & Kasslim, V., "Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi" (2024), 4:2, *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*.
- Simamora, J., & Suryaningsih, P. E., "Pembentukan Keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Sebagai Hakim Peradilan Etik.", (2024), 23:1, *Jurnal Ilmiah Kutei*.
- Supriyadi, S., & Purnamasari, A. I., "Redesign of Administrative Violation Handling at Bawaslu Post Determination of Election Results: Redesain

- Penanganan Pelanggaran Administratif di Bawaslu Pasca Penetapan Hasil Pemilu”, (2023), 20:1, *Jurnal Konstitusi*,
- Syailendra, M. R., Natanael, J., & Kurniawan, M. H., “Peran Konstitusi Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi Dan Supremasi Hukum Di Indonesia”, (2024), 4:4, *Multilingual: Journal of Universal Studies*.
- Tri Suhendra Arbani, “Pemenuhan Unsur Keadilan Dalam Pembuktian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Pilpres Dengan Konsep Speedy Trial”, (2019) *Call for Paper Evaluasi Pemilu Serentak 2019*.
- Warouw, Claudio C., Soepeno, M. Hero, & Korah, Revy S.M., "Tinjauan Yuridis Pelanggaran yang Bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif dalam Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.", (2023), 10:10, *Jurnal Hukum UNSRAT*.
- Widodo Ekatjahjana, “Berbagai Masalah dalam Pengaturan dan Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilukada Di Indonesia”, (2010), 3:1, *Jurnal Konstitusi*.
- Winata, M. R., & Indonesia, M. K. R., “*Judicial Restraint Dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif*”, (2020), 17:4, *Jurnal Legislasi Indonesia*.
- Wirma Silalahi, “Tenggang Waktu Penyelesaian Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi”, (2023), 1:1, *Konferensi Nasional APHTN*.
- Wohon, D. I., “Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada Menurut Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020.”, (2021), 10:11, *Lex Crimen*.

E. Disertasi dan Tesis

- Azuan Helmi, Tesis: “*Rekonseptualisasi Pelanggaran Terstruktur Sistematis Dan Masif Dalam Penyelesaian Sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi*”, (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2024)

Ilhamdi Putra, Tesis: *“Karakteristik dan Dampak Pembatasan Pengujian Norma Undang-Undang Melalui Permohonan Yang Tidak Dapat Diajukan Kembali di Mahkamah Konstitusi Terhadap Gagasan The Living Constitution”*, (Padang: Universitas Andalas 2021).

Prasetyo, W., Disertasi: *“Rekonstruksi Regulasi Pengembalian Kerugian Negara Pada Tindak Pidana Korupsi Melalui Kebijakan Mediasi Penal Yang Berbasis Keadilan Pancasila”*, (Semarang: Universitas Islam Sultan Agung 2024).

F. Kamus

Blackwell, Amy Hackney 2008, *The Essential Law Dictionary*, Sphinx Publishing an Imprint of Sourcebook, Inc, Illinois.

Black, Henry Campbell, 1968, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Co., Minnesota.

G. Internet

Brigitta Belia Permata Sari, *“MK Batasi Saksi dan Ahli Sidang Sengketa Pilpres Maksimal 19 Orang”*, <https://news.detik.com/berita/d-7262545/mk-batasi-saksi-dan-ahli-sidang-sengketa-pilpres-maksimal-19-orang/amp>.

Constitutional Court of Austria, *“2016: Run-off Election of the Federal President”*, https://www.vfgh.gv.at/timeline/2016__Bundespraesidentenstichwahl.en.html.

Eva Rianti, Erik Purnama Putra, *“MK Sebut Penanganan Pelanggaran TSM Bukan Kewenangannya”*, <https://news.republika.co.id/berita/scc15w484/mk-sebut-penanganan-pelanggaran-tsm-bukan-kewenangannya>.

Nicholas Ryan Aditya, Dani Prabowo, *“Pilpres Ulang Masih Dimungkinkan, Bivitri: Enggak Akan Serumit Bikin dari Nol”*,



<https://nasional.kompas.com/read/2024/04/01/14150851/pilpres-ulang-dinilai-masih-dimungkinkan-bivitri-enggak-akan-serumit-bikin>.

Pujiati, *“Pendekatan Induktif dan Deduktif dalam Penelitian”*,
<https://penerbitdeepublish.com/pendekatan-induktif-dan-deduktif-dalam-penelitian/>.

Rizki Baiquni Pratama, *“Sejarah Putusan Sengketa Pilpres 2004-2024: Baru Kali Ini Ada Dissenting Opinion”*,
<https://kumparan.com/kumparannews/sejarah-putusan-sengketa-pilpres-2004-2024-baru-kali-ini-ada-dissenting-opinion-22b8vnQlh7b>.

